

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Basuki, U. (2019). *Dasar Negara dan Hukum Dasar: Suatu Telaahan Yuridis atas Relasi Pancasila dan UUD 1945* By: Udiyo Basuki 1. 8(1).
- Budiman, M. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*.
- Chazawi, A. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana*.
- Hartanti, E. (2009). *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.
- KPK. (2006). *Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami untuk Membasmi; Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi* (Kedua).
- Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.
- Marzuki, P. M. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Kencana Prenamedia Group.
- Moeljatno. (1985). *Azas-azas Hukum Pidana*.
- Moeljatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*.
- Muis, A. (2021a). *Pemberantasan Korupsi* (A. Budiman (ed.)).
- Muis, A. (2021b). *pemberantasan korupsi fungsi dan kewenangan kepolisian negara republik indonesia dalam tindak pidana korupsi guna mengembalikan kerugian keuangan negara di indonesia* (A. Budiman (ed.)).
- Rahardjo, S. (2002). *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan*

*Masalah.* Sinar Grafika.

Ronny, H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.*

Salim, HS dan Septiana, E. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penulisan Tesis dan Disertasi.* Rajawali Press.

Setyawati, D. (2008). *Kpk Pemburu Koruptor: Kiprah Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Memberangus Korupsi.*

Soedirjo. (1985). *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana.* Akademika Pressindo.

Soerjono, S. (1982). *Kesadaran Hukum Dan Kepathan Hukum.* Rajawali.

Soerjono, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tujuan Singkat".*

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

### C. Sumber Lainnya

- Basri. (2017). Penegakan Hukum Kejahatan Korupsi Melalui Pendekatan Transendental. *Jurnal Varia Justicia*, 13.
- Bunga, M., Maroa, M., Arief, A., & Hardianto, D. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 15, 97.
- Hidayat, D. (2012). Pengaturan Kewenangan Kejaksaan Dalam Penuntutan Perkara Pidana. *Skripsi*, 22.
- Kemal, G. (2023). *Kewenangan Kejaksaan Sebagai Single Prosecution System (Sistem Penuntutan Tunggal) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Meldandy, M. (2021). *Eksistensi Single Prosecution System (Sistem Penuntutan Tunggal) Terhadap Kewenangan Jaksa Dalam Penuntutan Antara Jaksa Kpk Dengan Kejaksaan Republik Indonesia*. <http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>
- Novianti, T. (2016). Pelaksanaan Penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Riau dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap Kerugian Keuangan Negara. *JOM Fakultas Hukum*, 3.
- Ompu Jainah, Z. (2018). Pengaturan Interaksi Proses Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Keadilan Progresif*, 9, 14.
- Ridwan. (2012). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan

Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 8.

Ruslin. (2017). *Dampak Dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi Di Indonesia*. 1, 4–5.

Sukmareni. (2018). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Pagaruyung Law Journal*, 1.

<https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/877>

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-66309451>

<https://www.metrotvnews.com/play/NOICYEoE-perjalanan-polemik-penetapan-tersangka-kepala-basarnas>

[https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/739/5/111803018\\_file%205.pdf](https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/739/5/111803018_file%205.pdf)